

LAPORAN TESIS

**TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KECAMATAN
TAMALANREA KOTA MAKASSAR**

TESIS



MIRANTI

NIM 22.C2.0089

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

LAPORAN TESIS

TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum



MIRANTI

NIM 22.C2.0089

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Pengaturan tanggung jawab profesional tenaga teknis kefarmasian (TTK) merupakan upaya untuk memastikan pelayanan kefarmasian yang aman, efektif, dan sesuai standar yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang kefarmasian, sehingga sangat penting untuk lebih memperhatikan TTK agar lingkungan kefarmasian semakin baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan, pelaksanaan, dan hambatan dalam menjalankan tanggung jawab profesional Tenaga Teknis Kefarmasian dalam penyediaan pelayanan kesehatan di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar?

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis* dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskriptifkan dan menganalisis tentang pengaturan, pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi oleh Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan tanggung jawab profesional di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap informan utama, informan pendukung dan responden. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian semua data tersebut dianalisis secara *deskriptif* dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Regulasi yang mengatur Tenaga kefarmasian khususnya Tenaga Teknis Kefarmasian tertuang pada Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2) TTK bertugas dalam pelayanan kefarmasian, seperti penyediaan obat, skrining resep, dan pengelolaan stok. Meski peran mereka berjalan baik di berbagai fasilitas kesehatan, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya; 3) Tenaga Teknis Kefarmasian menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan tanggung jawab profesional. Hambatan tersebut meliputi faktor yuridis, seperti proses pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Kerja (SIK). Faktor teknis mencakup keterbatasan akses terhadap fasilitas dan dukungan teknis yang diperlukan, termasuk keterbatasan stok obat dan alat kesehatan. Sementara itu, faktor sumber daya manusia meliputi minimnya akses terhadap pengembangan kompetensi, rendahnya tingkat penghasilan, serta kesenjangan pengakuan profesional antara apoteker dan TTK. Hambatan-hambatan ini berdampak pada kualitas pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada masyarakat.

Kata kunci: *Tenaga Teknis Kefarmasian; Tanggung Jawab Profesional; Pelayanan Kefarmasian*

ABSTRACT

The regulation of the professional responsibilities of Pharmaceutical Technical Personnel (TTK) is an effort to ensure safe, effective, and standardized pharmaceutical services, in accordance with Health Law Number 17 of 2023, therefore, it is crucial to pay more attention to TTK to improve the pharmaceutical environment. The research problem in this study is: How are the regulation, implementation, and challenges in carrying out the professional responsibilities of Pharmaceutical Technical Personnel in providing healthcare services in Tamalanrea District, Makassar City?

This research is an analytical descriptive research using a sociological juridical approach. The purpose of the study is to descriptive and analyze the regulation, implementation and obstacles faced by Pharmaceutical Technical Personnel in carrying out professional responsibilities in Tamalanrea District, Makassar City. Primary data collection was carried out by interviewing the main informant, supporting informants and respondents. Secondary data was obtained through literature studies, then all of the data were analyzed descriptively and qualitatively.

The results of the study show that: 1) The regulation governing pharmaceutical personnel, especially Pharmaceutical Technical Personnel (TTK), is stipulated in Law Number 17 of 2023 on Health; 2) PTP is responsible for pharmaceutical services such as medication supply, prescription screening, and stock management. Although they perform well in various healthcare facilities, there are still challenges in their implementation; 3) Pharmaceutical Technical Personnel face various obstacles in carrying out professional responsibilities. These obstacles include juridical factors, such as the process of processing Registration Certificates (STRs) and Work Permits (SIK). Technical factors include limited access to facilities and necessary technical support, including limited stocks of drugs and medical devices. Meanwhile, human resource factors include lack of access to competency development, low income levels, and the gap in professional recognition between pharmacists and TTK. These obstacles have an impact on the quality of pharmaceutical services provided to the community.

Keywords: *Pharmaceutical Technical Personnel; Professional Responsibilities; Pharmaceutical Services*